

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PENELITIAN PENELITI MUDA (LITMUD) UNPAD**

**KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL (*SINGLE PRESENCE POLICY*)
DALAM MEWUJUDKAN PENGUATAN STRUKTUR PERBANKAN
INDONESIA**

Oleh:
Etty Mulyati, SH.MH.
Dr. Lastuti Abubakar, SH.MH.
R.Kartikasari, SH.MH.

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran
Tahun Anggaran 2008
Berdasarkan SPK No.411/H6.26/LP/PL/2008
Tanggal 16 April 2008

**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



**Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Dan Dinamika Sosial
Universitas padjadjaran
Nopember 2008**

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PENELITIAN PENELITI MUDA (LITMUD) UNPAD**

**KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL (*SINGLE PRESENCE POLICY*)
DALAM MEWUJUDKAN PENGUATAN STRUKTUR PERBANKAN
INDONESIA**

Oleh:
**Etty Mulyati, SH.MH.
Dr. Lastuti Abubakar, SH.MH.
R.Kartikasari, SH.MH.**

**Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran
Tahun Anggaran 2008
Berdasarkan SPK No.411/H6.26/LP/PL/2008
Tanggal 16 April 2008**

**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



**Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Dan Dinamika Sosial
Universitas padjadjaran
Nopember 2008**


**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN PENELITI MUDA (LITMUD) UNPAD
SUMBER DANA DIPA UNPAD
TAHUN ANGGARAN 2008**

1	a. Judul Penelitian	: Kebijakan Kepemilikan Tunggal (<i>Single Presence Policy</i>) dalam Mewujudkan Penguatan Struktur Perbankan Indonesia
	b. Macam Penelitian	: () Dasar () Terapan () Pengembangan
	c. Kategori	: I/II/III
2	Ketua Peneliti	
	a. Nama Lengkap	: Etty Mulyati, SH.MH.
	b. Jenis Kelamin	: Perempuan
	c. Pangkat/Golongan/NIP	: Penata TK I/IIIId/131873122
	d. Jabatan Fungsional	: Lektor
	e. Fakultas/Jurusan	: Hukum/Keperdataan
	f. Bidang Ilmu yang diteliti	: Ilmu Hukum
3	Jumlah Anggota Peneliti	: 3 orang
4	Lokasi Penelitian	: Bandung dan Jakarta
5	Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan sebutkan:	
	a. Nama Instansi	: --
	b. Alamat	: --
6	Jangka waktu Penelitian	: 6 bulan
7	Biaya penelitian	: Rp 6.125.000,- (Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Mengetahui:
Kapuslitbangkumdinsos Unpad,



Indra Perwira, SH.MH.
NIP. 131 566 992

Bandung, 14 Nopember 2008
Ketua Peneliti,


Etty Mulyati, SH.MH.
NIP. 131 873 122

Mengetahui:
Plh Ketua Lembaga Penelitian Unpad
Pembantu Rektor Bidang Kerjasama Unpad




Prof. Dr. Tb. Zulrizka Iskandar, S.Psi., M.Sc.
NIP. 130814978

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL (*SINGLE PRESENCE POLICY*) DALAM MEWUJUDKAN PENGUATAN STRUKTUR PERBANKAN INDONESIA

ABSTRAK

Pemerintah melalui Bank Indonesia mengumumkan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu beberapa tahun kedepan yang dikenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada tanggal 9 Januari 2004. Salah satu bentuk implementasi API dalam mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang kuat yaitu dengan melakukan penataan kembali struktur kepemilikan pada perbankan Indonesia, maka dalam hal ini Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (*Single Presence Policy*). Kebijakan ini mewajibkan kepada bank-bank nasional yang memiliki saham di beberapa bank untuk segera melakukan pengalihan sahamnya ke pihak lain, melakukan konsolidasi, merger, akuisisi atau dengan membuat *Bank Holding Company*. Pelaksanaan pemilihan opsi tersebut bukanlah hal yang mudah, karena setiap opsi tersebut akan memiliki konsekuensi yang dapat mempengaruhi keberadaan bank-bank tersebut. Sehingga timbul permasalahan Apakah *Single Presence Policy* merupakan suatu kebijakan yang tepat diterapkan pada perbankan Indonesia dan hambatan-hambatan yuridis apa saja dalam penerapan *Single Presence Policy* tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis khususnya upaya Bank Indonesia dalam rangka mendorong restrukturisasi perbankan melalui Kebijakan Kepemilikan Tunggal pada perbankan Indonesia, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal pada perbankan Indonesia, selanjutnya hasil penelitian dianalisis secara analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan Kepemilikan Tunggal (*Single Presence Policy*) sudah tepat diterapkan pada perbankan Indonesia dengan tujuan mengendalikan kepemilikan asing dan mengurangi jumlah bank sehingga mendukung efektifitas pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap bank-bank. Hambatan pada perubahan struktur perbankan antara lain menentukan opsi yang tepat bagi bank-bank BUMN karena setiap bank akan mempunyai argumentasi mengenai posisi banknya. Disamping itu bank-bank swasta nasional dengan berbagai kondisi lebih suka menjual banknya ke pihak asing dari pada melakukan penggabungan dengan bank lainnya.

SINGLE PRESENCE POLICY TO STRENGTHEN THE INDONESIAN BANKING STRUCTURE

ABSTRACT

Bank of Indonesia on behalf of Indonesian Government, on January 9, 2004, announced a framework of basic Indonesian Banking System which is complete, directive, forms and giving Indonesian banking industry for future structure that is known as Indonesian Banking Architecture (IBA). One of the implementations of IBA in applying a strong Indonesian banking structure is by restructuring Indonesian banking ownership as adopted by Bank of Indonesia in its Directive (BID) No. 8/16/PBI/2006 on Single Presence Policy. This policy rules that National Banks who own shares in other banks have to transfer their ownership to other party by consolidation, merger, acquisition, or by making Bank Holding Company. The application of choosing one of those options is not an easy task since any option will have consequences that may affect the existence of those banks. The case is whether Single Presence Policy is an applicable policy to Indonesian national banks and what are the legal obstacles that may come up in the application of Single Presence Policy.

The method that is used in this research is Descriptive – Analytical to obtain a complete and systematic image through an analytical process in particular the effort of Bank of Indonesia to restructure the banking system through Single Presence Policy to Indonesian national banks. The approach method that is used in this research is juridical – normative by recalling, reaffirming, and considering secondary data that are related to Single Presence Policy to Indonesian national banks and further the result of this research will be qualitative analyzed.

On the basis of the result of this research that a Single Presence Policy is certainly applied to Indonesian national banks to control foreign ownership and to decrease number of banks to obtain an effective supervision by Bank of Indonesia to any national banks in Indonesia. The obstacles in changing the banking restructuring for instance is to find a certain option to State owned banks since any banks will have argumentations regarding the position of their enterprises. Other than that, private national banks regardless to their conditions will be more likely to transfer their ownership to foreign party other than to merge their enterprises with another.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya yang telah memberikan jalan untuk menyelesaikan penelitian ini dengan judul: **Kebijakan Kepemilikan Tunggal (*Single Presence Policy*) Dalam Mewujudkan Penguatan Struktur Perbankan Indonesia**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan sumbangan pemikiran, saran, tanggapan, maupun kritik yang membangun atas kelemahan yang mungkin terdapat dalam penelitian ini.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas penelitian ini.

Akhirul kata semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah membantu. Semoga penelitian ini dapat memenuhi tujuannya dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Amin.

Bandung, Nopember 2008

BAB I

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara, lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencari tujuan nasional dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.¹ Lembaga perbankan diantaranya berperan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, karena stabilitas dalam industri perbankan akan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara atau intermediasi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*).² Fungsi intermediasi tersebut merupakan program pemerintah yang tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, Mater 2007, hlm.41

² Insukindro, *Ekonomi Uang dan Bank, Teori dan pengalaman di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 1997, hlm.1.